**PENTINGNYA KOORDINASI TERHADAP PENGGUNAAN KEUANGAN DESA
DAN ASET DESA PADA KAMPUNG KALISUSU DISTRIK NABIRE
KABUPATEN NABIRE**

Kristina M. Tasane

(Email : kristinatasane96@yahoo.com)

Dominikus Selvius

(Email : dominikusselvius75@gmail.com)

Semuel Max Pesiwarissa

(Email : semuelmax72@gmail.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Satya Wiyata Mandala

ABSTRAK

Desa di berikan kewenangan untuk mengatur dalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang ada di desa, untuk itu Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa sangat penting, baik antara aparat kampung dengan tokoh masyarakat serta pemerintah daerah maupun dengan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui Sejauhmana Pentingnya Koordinasi terhadap penggunaan keuangan desa dan aset desa Pada Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire, 2). Untuk mengetahui Kendala – kendala apa sehingga koordinasi kurang di laksanakan dengan baik terutama dalam penggunaan keuangan desa dan aset desa Pada Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan 3)..Untuk mengetahui Upaya apa yang harus dilakukan sehingga penggunaan keuangan desa dan aset desa dapat dilaksanakan dengan baik Pada Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire

Dari jumlah populasi sebanyak 6.385 orang teknik sampel yang digunakan yaitu Sampel Proposive yaitu sebanyak 37 orang yang terdiri dari aparat kampung sebanyak 6 orang, Bamuskam sebanyak 6 orang dan masyarakat di masing – masing RT/RW sebanyak 25 orang

Keyword : *Koordinasi, Keuangan Desa dan Aset Desa*

PENGANTAR

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa menjelaskan bahwa yang di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan ma masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Koordinasi atau musyawarah merupakan tonggak utama dalam penyelenggaraan pembangunan di kampung dengan demikian antara aparat kampung dengan tokoh masyarakat dan lembaga lembaga lainnya di kampung perlu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada di desa/kampung karena peraturan desa merupakan kesepakatan yang telah di tentukan atau di tetapkan oleh kepala desa/kampung dengan badan musyawarah kampung yang ada

Sesuatu hal yang menjadi persoalan di desa/kampung adalah terletak pada masalah keuangan kampung, kenapa di katakan demikian karena kerap terjadi permasalahan antara aparat kampung dengan kepala kampung maupun dengan tokoh masyarakat serta masyarakat tentang penggunaan keuangan desa dan penggunaan aset desa yang ada. sehingga saling ketidak percayaan antara satu dengan yang lain akibatnya sangat menghambat proses pembangunan yang ada.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 10 dan 11 yang di maksudkan dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, sedangkan yang di maksudkan dengan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, di beli serta diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Salah satu hal yang sangat di harapkan dalam Human Relation atau Hubungan antar Manusia adalah fungsi Koordinasi, karena dengan Koordinasi yang baik maka semua tugas dan tujuan kesejahteraan masyarakat akan cepat tercapai. karena koordinasi di butuhkan sehubungan dengan semakin kompleks dan besarnya suatu wilayah yang ada, demikian pula dalam masalah koordinasi pengendalian tergantung atas kemampuan dan kecakapan dari kepala kampung selaku pimpinan harus mampu dalam mengendalikan aparatnya dengan masyarakat .terutama koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggung jawaban yang semuanya mengarah kepada penggunaan keuangan desa yang di peroleh.

Melihat pada permasalahan yang diuraikan tersebut maka penulis dalam melakukan suatu pengamatan pada Kampung kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire sebagai berikut:

- 1) Kurang adanya koordinasi antara Kepala Kampung dan Aparat Kampung dalam penggunaan keuangan desa dan aset desa sehingga masyarakat kurang percaya dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Kampung.
- 2) Kurang adanya keterbukaan kepala kampung akan keuangan desa, sehingga masyarakat kurang merasakan adanya pembangunan.
- 3) Kurang adaya kerja sama yang baik antara Kepala kampung serta aparat kampung dengan Masyarakat dalam setiap perencanaan Pembangunan.
- 4) Kurangnya kesadaran aparat kampung dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Koordinasi yang sangat kurang dari aparat Kampung untuk melibatkan Masyarakat dalam setiap proses Pembangunan.

Dimana berdasarkan masalah tersebut diatas, maka penulis hendak merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Sejauhmana Koordinasi terhadap penggunaan keuangan desa dan aset desa Pada Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire ?

- 2) Kendala – kendala apa sehingga koordinasi kurang di laksanakan dengan baik terutama dalam penggunaan keuangan desa dan aset desa Pada Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire ?
- 3) Upaya apa yang harus dilakukan sehingga penggunaan keuangan desa dan aset desa dapat dilaksanakan dengan baik Pada Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire ?

LANDASAN TEORITIS

A. Koordinasi

Menurut S.P. Siagian (2001:23) koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses kerja dari mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Menurut Pariata Westa (1991:64) koordinasi adalah kegiatan untuk mengarahkan unit kerja, pekerjaan dan para personil organisasi agar semuanya berlangsung dalam suasana tertib, bahkan tidak kacau dan tetap tertuju pada pencapaian tujuan yang hendak dicapai.

Menurut H. Hadari Nawawi (1994:93) koordinasi pada dasarnya adalah:

1. Sinkronisasi yang teratur dari usaha untuk menciptakan kualitas, waktu dan pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah di tentukan.
2. Sesuatu yang mengandung aspek aspek untuk mencegah kekacauan, percecokan, kembaran kerja sebagai akibat dari pekerjaan yang menghubungkan, menyatu padukan dan menyelaraskan orang orang dan pekerjaannya dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut Syarifuddin (1996:22) koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan dan menyelaraskan setiap langkah kegiatan dalam organisasi

agar tercapai gerak yang cepat dan tepat pada sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Moekijat (1994:57) koordinasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Mengadakan pertemuan koordinasi antarpejabat.
- b) Mengadakan pertemuan formal antar pejabat yang disebut rapat.
- c) Membuat edaran berantai kepada pejabat yang diperlukan.
- d) Menyebarkan kartu nama kepada pejabat yang memerlukan.
- e) Mengangkat koordinasi.
- f) Membuat buku pedoman organisasi, pedoman tata kerja, dan kumpulan peraturan.
- g) Berhubungan dengan alat perhubungan.
- h) Membuat tanda, simbol, kode dan lain lain.

B. Keuangan Desa dan Aset Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII Keuangan desa dan Aset desa pasal 71 ayat 1 dan 2 yaitu :

- 1) Pasal 71 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- 2) Pasal 71 ayat 2 menjelaskan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII Keuangan desa dan Aset desa pasal 76 ayat 1 dan 2 yaitu :

- 1) Pasal 76 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan aset desa adalah tanah kas desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa.

- 2) Pasal 76 ayat 2 menjelaskan bahwa aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain:
- a) Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
 - c) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain- lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - d) Hasil kerja sama desa.
 - e) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
 1. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat di hibahkan kepemilikannya kepada Desa.
 2. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
 3. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
 4. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Deskriptif menurut Winarno Surahmad (1978 : 8) yang menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif adalah membicarakan beberapa kemungkinan untuk pemecahan masalah yang actual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikannya, menganalisa dan menginterpretasikan.

B. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian berada pada Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Arianto Suhartini (1998 : 115) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Dari pendapat tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa mencakup semua objek yang akan diteliti dengan ciri-cirinya dalam wilayah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Penduduk Pada Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire berjumlah 6385 orang

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang dijadikan dasar untuk penelitian sebagai sumber data. Maka yang menjadi sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yaitu dengan menggunakan teknik penarikan sampel Purposive Sampling. dengan demikian jumlah sampel sebanyak 37 orang yang terdiri dari:

- Aparat kampung sebanyak 6 orang
- Bamuskam sebanyak 6 orang
- RT/RW sebanyak 25 orang
- Jumlah sebanyak 37 orang

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

- a) **Data Primer** adalah metode pengumpulan data dari asal sumber pada lokasi penelitian..
- b) **Data Sekunder** adalah data yang diperoleh dari tempat yang berhubungan dengan masalah penelitian

2. Teknik Pengumpulan Data

a) Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, baik pengamatan yang dilakukan

dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi rekayasa yang khususnya dilaksanakan dilapangan penelitian.

b) Wawancara (Interview)

Menurut Koenjaraningrat (1981 : 162) bahwa wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan atau penelitian secara lisan dan seorang responden, dengan bercakap – cakap berhadapan dengan orang tersebut.

c) Angket (Questioner)

Menurut Hadi (1972 : 223) Questioner adalah daftar pertanyaan yang dibagikan kepada sejumlah orang untuk diisi atau dijawab tanpa ada bantuan langsung dari orang yang membuat daftar pertanyaan dengan maksud memperoleh bahan tertentu terhadap suatu masalah.

E. Teknik Pengelolaan Data

Setelah pengumpulan data, maka selanjutnya data tersebut diolah dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Editing (Mengedit)

Pada tahap ini penulis memeriksa kembali data yang diperoleh dari responden, guna menentukan kepastian data mengenai kesesuaian pengisian seraf relevansinya jawaban untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari responden dipakai atau tidak.

2. Koding (Pemberian Kode)

Koding yaitu saat pengelompokkan jawaban responden dan memberikan tanda, symbol, kode – kode tertentu untuk mempermudah proses pengolahan data.

3. Tabulating (Tabulasi)

Pada tahap ini penulis mengategorikan jawaban – jawaban responden dengan menempatkan sesuai dengan proporsi masing – masing. Adapun data terkumpul dalam daftar pertanyaan questioner diolah kemudian dibuat dalam bentuk tabel dan

berdasarkan frekuensi perhitungan presentase rumus menurut Anto Dayan (1973) adalah :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Prosentase

F = Frekuensi

n = Jumlah Responden

100 % = Angka Konstan

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian data tersebut diatas diolah dan dianalisis. Dalam pengolahan data ini penulis mengumpulkan analisa data kualitatif.

Analisis kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data dalam bentuk kata atau kalimat. Analisa kuantitatif digunakan untuk menginterpretasikan data dalam bentuk angka.

PEMBAHASAN

A. Pentingnya Koordinasi (Variabel Bebas)

koordinasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan sebelumnya, maka sesuai dengan penelitian penulis di Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire dengan tugas untuk penggunaan keuangan desa dan aset desa maka akan dapat dilihat pada pertanyaan – pertanyaan yang di sampaikan kepada responden maka dapat di sajikan sebagai berikut :

1) Kerjasama

Tabel 1

Tanggapan responden tentang kerjasama yang baik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Selalu	4	11%
2.	Kadang- kadang	17	46%
3.	Tidak pernah	16	43%
Jumlah		37	100%

Sumber Data : Hasil olahan data primer, 2018

Dari jawaban responden yang ada pada penyajian data Tabel 1 tentang adanya kerja sama antara kepala kampung dengan aparat kampung maupun masyarakat yang ada di Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire, terbukti bahwa sebagian besar responden mengatakan kadang- kadang aparat kampung melakukan kerja sama yang baik dengan masyarakat yaitu dibuktikan dengan jawaban yang diberikan kepada responden yaitu sebesar 46% dan merupakan jawaban yang besar bila dibandingkan dengan jawaban responden lainnya,

Hal ini menunjukkan bahwa ada kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan namun kurang dilakukan dengan baik sehingga masyarakat kurang mengetahui bahkan tidak mengetahui kegiatan pembangunan yang ada.

Tabel 2

Tanggapan responden tentang adanya pertemuan antara kepala kampung dengan masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Selalu	4	11%
2.	Kadang kadang	20	54%
3.	Tidak pernah	13	35%
Jumlah		37	100%

Sumber Data : Hasil olahan data primer, 2018

Dari jawaban responden yang penulis sajikan pada Tabel 2, tentang apakah ada pertemuan antara kepala kampung dengan masyarakat dalam proses maupun dalam perencanaan pembangunan di Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire, terbukti bahwa 54% responden mengatakan kadang-kadang ada pertemuan yang dilakukan antara Kepala Kampung dengan Masyarakat dalam rangka sosialisasi.

Jawaban responden tersebut merupakan jawaban yang lebih besar dari jawaban responden lainnya, hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan responden atau sebagian besar masyarakat mengeluh dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Kampung tanpa melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan program maupun kegiatan yang ada di kampung. Begitu pula pada bidang pelayanan masyarakat merasa kurang adanya penjelasan dalam melakukan pelayanan oleh aparat kampung sehingga terkadang masyarakat bingung atau tidak tahu proses dan prosedur pelayanan yang dilakukan.

2) Hubungan Kerja

Tabel 3
Tanggapan responden tentang hubungan kerja

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Baik	6	16%
2.	Kurang baik	31	84%
3.	Tidak baik	-	-
Jumlah		37	100%

Sumber Data : Hasil olahan data primer, 2018

Dari jawaban responden pada Tabel 3 tentang adanya hubungan kerja antara kepala kampung dengan masyarakat di Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire dalam program perencanaan kegiatan kreasi terbukti bahwa sebagian besar responden menjawab kurang baik ada hubungan antara kepala kampung dengan aparat kampung yang ada maupun dengan masyarakat yaitu sebesar 84% lebih besar dari jawaban responden lainnya, hal ini membuktikan bahwa komunikasi antara Kepala kampung dengan masyarakat tetap ada namun prosentasenya sangat kecil.

Dari hasil wawancara penulis dengan responden dengan masyarakat bahwa Kepala Kampung tidak melibatkan masyarakat secara langsung untuk meminta pendapat maupun meminta petunjuk kira kira model pelayanan yang terbaik seperti apa, atau juga aparat kampung tidak dilibatkan secara langsung untuk mengikuti kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Distrik maupun Pemerintah Daerah sehingga dapat menciptakan kreatifitas kreatifitas baru dalam pelayanan agar masyarakat dapat tertarik untuk melakukan pelayanan di Kantor Kampung.

Tabel 4
Tanggapan responden tentang transparansi

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Selalu	3	8%
2.	Kadang kadang	23	62%
3.	Tidak pernah	11	30%
Jumlah		37	100%

Sumber Data : Hasil olahan data primer, 2018

Dari jawaban responden pada Tabel 4 tentang adanya keterbukaan atau transparansi kepala kampung dengan aparat kampung maupun dengan masyarakat di Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire, terbukti bahwa jawaban responden yaitu sebesar 62 % mengatakan kadang kadang adanya transparansi kepal kampung dengan aparat yang ada maupun dengan masyarakat terutama dalam bidang keuangan dan aset kampung sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas keuangan yang di terima kampung maupun aset kampung yang harus di ketahui oleh masyarakat.

3) Pembagian Tugas

Tabel 5
Tanggapan responden tentang pembagian tugas

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Selalu	3	8%
2.	Kadang kadang	18	49%
3.	Tidak pernah	16	43%
Jumlah		37	100%

Sumber Data : Hasil olahan data primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 5 tentang adanya pembagian tugas yang dilakukan oleh kepala kampung kepada aparat kampung maupun kepada ketua RT dan RW yang ada di Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire, terbukti dari jawaban responden yang ada sebagian besar responden menjawab kadang kadang yaitu sebesar 49% walaupun prosentase jawaban responden kurang terlalu besar namun dan lebih besar dari jawaban responden lainnya.

Dari jawaban tersebut penulis setelah melakukan wawancara dengan responden terbukti bahwa karena kurangnya adanya pemberian tugas dengan jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka aparat kampung juga kurang merasa memberikan perhatian dengan tugas dan tanggung jawab.

Tabel 6
Tanggapan responden tentang pembagian tugas sesuai ketentuan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Sesuai	2	5%
2.	Kurang sesuai	7	19%
3.	Tidak sesuai	28	76%
Jumlah		37	100%

Sumber Data : Hasil olahan data primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 6 tentang adanya pembagian tugas sesuai dengan ketentuan yang ada, terbukti dari jawaban responden yang ada sebagian besar responden menjawab tidak sesuai tugas yang di berikan kepada aparat kampung dengan pedoman dan tugas pokok yang ada sehingga terkadang masyarakat merasa bingung dengan pelayanan yang diberikan oleh aparat kampung yaitu sebesar 56%, lebih besar dari jawaban responden lainnya.

Dari jawaban tersebut penulis setelah melakukan wawancara dengan responden atau masyarakat yang ada memang mereka sering melakukan pelayanan ke Kantor Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire namun karena tidak sesuai dengan pelayanan maka masyarakat merasa kurang puas karena orang

yang memberikan pelayanan kurang mengetahui tugas dan pekerjaan yang harus di lakukan.

B. Penggunaan keuangan dan aset kampung (Variabel Terikat)

Dalam setiap penggunaan keuangan maupun aset yang ada di kampung haruslah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku, karena semuanya berdampak kepada pelaporan, hal ini perlu dilakukan agar antara aparat kampung dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta dengan masyarakat di Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dapat dibuktikan dengan indikator – indikator sebagai berikut :

1) Sesuai Rencana

Tabel 7

Tanggapan responden tentang perencanaan sesuai dengan keuangan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Sesuai	2	5%
2.	Kurang sesuai	16	43%
3.	Tidak sesuai	19	52%
Jumlah		37	100%

Sumber Data : Hasil olahan data primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 7 tentang adanya perencanaan dan pembangunan yang sesuai dengan keuangan dan aset desa yang ada di Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire, terbukti bahwa pada kategori jawaban responden kurang sesuai adanya perencanaan dengan keuangan atau anggaran yang ada yaitu sebesar 52%, hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan pembangunan kampung baik secara fisik maupun non fisik tetap dilakukan namun tidak sesuai dengan anggaran yang di terima, untuk itu di harapkan adanya keterbukaan dan transparansi dari kepala kampung kepada aparat kampung maupun kepada masyarakat akan pendapatan keuangan kampung sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas.

Tabel 8

Tanggapan responden tentang transparansi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Selalu	8	22%
2.	Kadang kadang	12	33%
3.	Tidak pernah	17	45%
Jumlah		37	100%

Sumber Data : Hasil olahan data primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4.8. tentang adanya transparansi dari Kepala Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire, terbukti bahwa pada kategori jawaban responden tidak pernah lebih besar bila dibandingkan dengan kategori jawaban responden lainnya yaitu sebesar 45 %, hal ini menunjukkan bahwa karena Kepala Kampung tidak transparansi biaya maka pembangunan kurang maksimal di laksanakan.

2) Sesuai Aturan

Tabel 9

Tanggapan responden tentang pelaporan keuangan dan aset kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Sesuai	5	14%
2.	Kurang sesuai	14	38%
3.	Tidak sesuai	18	48%
Jumlah		37	100%

Sumber Data : Hasil olahan data primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 9 tentang adanya pelaporan keuangan dan aset Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire, terbukti bahwa pada kategori jawaban responden tidak sesuai perencanaan pembangunan yang dilaksanakan yaitu sebesar 48%, hal ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung perlu membuat pelaporan keuangan atau anggaran sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan sebagai panduan.

Tabel 10
Tanggapan responden tentang pelaporan keuangan dan aset kampung sesuai dengan ketentuan yang ada

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Sesuai	3	8%
2.	Kurang sesuai	12	32%
3.	Tidak sesuai	22	60%
Jumlah		37	100%

Sumber Data : Hasil olahan data primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 10 tentang adanya pelaporan keuangan dan aset kampung yang ada di Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire, terbukti bahwa pada kategori jawaban responden tidak sesuai lebih besar bila dibandingkan dengan kategori jawaban responden lainnya yaitu sebesar 60%. Mengingat jawaban ini sangat besar sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kurang adanya keterbukaan dan penggunaan anggaran sehingga Kepala Kampung dalam membuat pelaporan juga kurang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

3) Tepat Sasaran

Tabel 11
Tanggapan responden tentang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Sesuai	6	16%
2.	Kurang sesuai	12	32%
3.	Tidak sesuai	19	52%
Jumlah		37	100%

Sumber Data : Hasil olahan data primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 11 tentang adanya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire, terbukti pada kategori jawaban responden tidak sesuai dengan ketentuan yang yaitu sebesar 52% dan merupakan jawaban yang lebih besar bila dibandingkan dengan kategori jawaban responden lainnya. dan hal ini terjadi karena kurang adanya pertemuan maupun keterbukaan Kepala

Kampung dengan anggaran keuangan yang ada sehingga dalam pelaksanaan pembangunan juga kurang sesuai dengan keinginan dan kemauan masyarakat.

Tabel 12
Tanggapan responden tentang adanya evaluasi dari aparat kampung dalam penggunaan keuangan dan aset kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Selalu	6	16%
2.	Kadang- kadang	16	43%
3.	Tidak pernah	15	41%
	Jumlah	37	100%

Sumber Data : Hasil olahan data primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 12 tentang adanya evaluasi yang dilakukan dari Aparat Kampung dalam penggunaan keuangan dan aset Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire, terbukti bahwa pada kategori jawaban responden kadang – kadang lebih besar dari kategori jawaban responden lainnya yaitu sebesar 43 %.hal ini menunjukkan bahwa aparat kampung kurang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik kepada setiap proses pembangunan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden sebagian besar responden mengatakan bahwa karena aparat kampung kurang melakukan evaluasi maka masyarakat juga tidak dapat memberikan usul dan saran kepada Aparat kampung tentang pelaksanaan pembangunan yang sementara dilaksanakan maupun yang akan di laksanakan ke depan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kurangnya adanya kerja sama yang baik antara Kepala Kampung dengan Aparat Kampung maupun dengan masyarakat yang ada di Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire

2. Kurangnya adanya hubungan kerja yang baik antara Kepala Kampung dan Aparat Kampung diakibatkan karena Kepala Kampung baru di tunjuk oleh Bupati tanpa melalui proses yang baik.
3. Tidak adanya pembagian tugas kepada Aparat kampung dengan jelas sehingga mereka tidak tau tugas dan pekerjaan yang ada..
4. Perencanaan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan.
5. Ketepatan pembangunan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
6. Kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman.

B. Saran

Dari kesimpulan yang penulis kemukakan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepala Kampung perlu melakukan koordinasi dan keterbukaan dalam segi anggaran kepada aparat Kampung maupun kepada Masyarakat dengan baik.
2. Kepala Kampung perlu melakukan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan di kampung.
3. Kepala Kampung perlu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto Dajan, *Metode Penelitian Survey*, Balai Pustaka, Jakarta, 1973
- Arikunto Suharsini, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 1998.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University, Jakarta 2001;
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Aksara Baru, Jakarta, 1993
- Moekijat, *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1991

S.P.Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1995

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1993